

MONOGRAF

PENGARUH KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEHUBUNGAN PENERAPAN AMANDEMEN MANILA STWW 2010
TERHADAP KOMPETENSI LULUSAN DI PROGRAM DIPLOMA PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

MUDIYANTO, S.AB.,M.M



ISBN 978-602-5595-21-9



Hang Tuah University Press

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amandemen STCW Manila. Pada 25 Juni 2010, Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta stakeholder utama lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi meratifikasi apa yang disebut sebagai "Amandemen Manila" terhadap Konvensi Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (STCW) dan Aturan terkait. Amandemen Manila bertujuan untuk membuat STCW selalu mengikuti perkembangan jaman sejak pembuatan dan penerapan awal pada tahun 1978, dan amandemen selanjutnya pada tahun 1995.

Mulai Berlakunya Amandemen Konvensi STCW yang akan diterapkan melalui prosedur penerimaan dengan pemahaman yang telah disepakati mengisyaratkan bahwa perubahan tersebut harus sudah diterima paling lambat 1 Juli 2011 kecuali bila lebih dari 50% dari para pihak terkait STCW menolak perubahan yang demikian. Sebagai hasilnya, Amandemen STCW ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Menjadi sangat ironis ketika banyak berbagai pihak terutama pengelola Lembaga Pendidikan Maritim akan kesulitan saat mengetahui Standar Minimal Sistem Pendidikan Kepelautan (QSS) . QSS yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu diragukan. Terbitnya STCW Amandemen 2010 dapat memperjelas dan mempertegas pentingnya QSS untuk dilaksanakan oleh semua Lembaga Diklat/ Sekolah Pelayaran.

Mutu/ kompetensi Lulusan Sekolah / Lembaga Diklat Pelayaran selama ini memang menjadi masalah tersendiri bagi Dunia Internasional. Kerusakan pada Lingkungan Laut dan tingginya angka kecelakaan di laut dalam tahun-tahun terakhir ini menjadi indikator penting bagi Masyarakat Internasional untuk menilai

kompetensi tenaga kepelautan dan kelaiklautan kapal. Para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pengoperasian kapal di laut (seperti : Sekolah/ Lembaga Diklat, Perusahaan Pelayaran, Instansi-instansi Kepelabuhan, Lembaga-Lembaga Kendali Mutu) harus memiliki kesamaan pemahaman akan pentingnya Kualitas/ kompetensi SDM Pelayaran Indonesia.

Kesadaran dari seluruh komponen terkait itu akan membangun citra positif SDM Kepelautan dan Sistem Pelayaran Indonesia di mata Dunia Internasional. Indonesia dituntut untuk terus dapat mempertahankan *White List* di Internasional Maritime Organization (IMO) karena akan berpengaruh pada Kestabilan Perekonomian Negara.

Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK. 2162/HK.208/XI/DIKLAT-2010 maka Lembaga Diklat/Sekolah Pelayaran memiliki Pedoman bagi Penyelenggaraan Diklat yang dilakukannya. Dalam Surat Keputusan tersebut telah disebutkan Persyaratan Minimal yang harus dipenuhi oleh Lembaga Diklat/Sekolah Pelayaran. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui atau tidak memenuhi persyaratan itu. Lembaga Diklat/ Sekolah Pelayaran sudah saatnya membangun sistem di atas Standar Mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Dunia Internasional .

Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepelautan (Pelayaran) itu sangat sesuai dengan tuntutan dunia pelayaran dan selaras dengan bunyi Pasal 35, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ke-8 Standar Nasional Pendidikan itu terdiri dari : Standar Isi ; Standar Proses ; Standar Kompetensi Lulusan ; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; Standar Sarana dan Prasarana ; Standar Pengelolaan ; Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan

Didorong cinta tanah air dan tanggungjawab terhadap kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa, khususnya dalam usaha untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan dan membina sumber daya manusia ahli dan terampil di bidang kelautan, maka Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah membulatkan tekad untuk mendirikan suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan tekad, pada tanggal 4 Maret 1987 telah di kukuhkan berdirinya Yayasan Nala dengan akta pendirian No 5 di hadapan notaris R. Soedjono di Surabaya. Yayasan Nala ini didirikan dengan maksud serta tujuan sebagai peran serta TNI AL dalam upaya pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan sistem pendidikan nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan yang dimaksud berwawasan kelautan, sehingga dapat mendukung tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam dunia kemaritiman dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1987, pemimpin TNI AL membentuk panitia kerja untuk mempersiapkan pendirian Universitas Hang Tuah Surabaya yang beranggotakan 5 (lima) orang perwira TNI AL, yakni Laksma TNI Anwar Afandi sebagai ketua, Kol. Laut (KH) Drs. Soekimin Pranoto sebagai wakil ketua, Letkol. (P) Kamidjo sebagai sekretaris, Kol Laut Budi Subagyo, Kol (Purn) Suradi, Letkol Laut (T) Sudarto, B.A sebagai anggota.

Dengan usaha keras dari panitia kerja ini, maka pada tanggal 12 Mei 1987, bertepatan dengan Hari Pendidikan TNI AL, Universitas Hang Tuah Surabaya diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI R. Kasenda. Untuk pertama kali yang menjabat sebagai Rektor adalah Laksma TNI Suyoso Sukarno, Ph.D (Wagub. AAL) Universitas Hang Tuah menyelenggarakan perkuliahan di Kampus Teluk Bayur No.6 Surabaya. Fakultas-fakultas yang telah dibuka adalah Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Administrasi dan fakultas Hukum. Sementara badan Hukum Yayasan

Nala yang berkedudukan di Surabaya juga telah berhasil membentuk Ketua Harian yayasan Nala yang dijabat oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Edi Hidrosin (Gubernur AAL).

Dalam upaya pembinaan manajemen yang lebih terpadu, pada tanggal 20 April 1987 Kasal selaku Ketua Dewan Yayasan Nala, mengeluarkan beberapa surat keputusan penting tentang pengangkatan jabatan. Namun karena padatnya tugas-tugas Kepala Staf Angkatan Laut, berdasarkan surat keputusan Nomor 1322, tanggungjawab Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala dialihkan dari Kasal kepada Deputi Kasal Bidang Operasi berdasarkan akta nomor 10 Notaris R. Soedjono di Surabaya tanggal 23 Mei 1988.

Universitas Hang Tuah yang berwawasan kelautan, dapat menunjukkan secara jelas Pola Ilmiah Pokok yakni ilmu dan teknologi kelautan, sesuai dengan aspirasi TNI AL yaitu ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Program studi S-1 dan program diploma III yang ada di Universitas Hang Tuah antara lain : Fakultas Teknologi kelautan memiliki program studi S-1 Oseanografi, program diploma III nautika, dan teknika. Fakultas Teknik dengan program studi S-1 Teknik perkapalan, Teknik Sistem Pekapalan, dan Teknik Elektro pada tahun 1993 . Fakultas Perikanan dengan program studi S-1 Budidaya Perairan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Kedokteran Umum dengan muatan lokal kesehatan maritim. Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum dengan penekanan pada hukum internasional. Fakultas Kedokteran Gigi dengan Program studi ilmu kedokteran gigi.

Pada Angkatan pertama pada tahun 1987 selain mahasiswa dari lulusan SLTA, Fakultas Teknologi Kelautan menerima mahasiswa limpahan dari Taruna Akademi Kemaritiman Surabaya –I (AKS-I) dan (AKS-II), Jurusan Nautika (Jenjang D-3) dan Jurusan Teknika (Jenjang D-3), Status diakui berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 391/Dikti/Kep/1992 tanggal 19 Agustus 1992.

Pada tahun 2002 dibentuk Program Diploma Kelautan/Kemaritiman terpisah dari Fakultas Teknologi Kelautan berdasarkan Skep. Nomor: Skep/32/VIII/2002 tentang Penataan Kembali dan Pembentukan Program Studi pada Fakultas-fakultas dan Program Diploma Universitas Hang Tuah Surabaya. Terdapat sinergi Program Studi Oceanografi dari Fakultas Teknologi Kelautan dengan Program-program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Budidaya Perairan dan Teknologi Hasil Perikanan dari Fakultas Perikanan dalam satu Fakultas dengan nama Fakultas Teknologi Kelautan dan Perikanan disingkat FTKP.

Program Diploma Kelautan/Kemaritiman memiliki jurusan :

1. Jurusan Nautika (jenjang D-3) yang menghasilkan lulusan A.Md. dan Ahli NautikaTingkat – III (jenjang Profesi Pelaut) setelah mengikuti ujian Kepelautan di Semarang
2. Jurusan Teknika (jenjang D-3) yang menghasilkan lulusan A.Md. dan Ahli NautikaTingkat – III (jenjang Profesi Pelaut) setelah mengikuti ujian Kepelautan di Semarang.

Pada T.A. 2005/2006 PDK/K telah menambah 1 program studi lagi yaitu : Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga (jenjang D-3) yang menghasilkan lulusan A.Md.

Pada tahun 2010 " Program Diploma Kelautan/Kemaritiman " berganti nama menjadi "Program Diploma Pelayaran " yang sampai dengan saat ini masih terus berkiprah dalam Pendidikan Kepelautan dan Kemaritiman dan ikut berperan aktif dalam memajukan dan mencerdaskan Sumber Daya Manusia Indonesia supaya dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.

Untuk menghadapi kesiapan menghadapi perubahan system pendidikan yang dipersyaratkan di Amandemen STCW 2010, Program Diploma Pelayaran telah mempersiapkan beberapa hal diantaranya mempersiapkan Sumber Daya Manusia/ Tenaga Pendidik yang berkompeten dibidangnya, akan tetapi masih mengalami beberapa kesulitan dalam merekrut Tenaga Pendidik/ Dosen yang sesuai bidangnya. Selain itu juga ada beberapa hal yang dilengkapi dalam persiapan pemberlakuan Amandemen STCW 2010 yaitu melengkapi Laboratorium yang telah dipersyaratkan.

Sehubungan dengan uraian diatas peneliti ingin mengambil judul penelitian “**Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Sehubungan Penerapan Amandemen Manila STCW 2010 Terhadap Kompetensi Lulusan Di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah ; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sumber Daya Manusia).

1. Apakah Standar Pendidik berpengaruh terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran?
2. Apakah Standar Tenaga Kependidikan berpengaruh terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk menganalisis dan membuktikan Pengaruh Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai penerapan Amandemen Manilia 2010 terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi tiga, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis dan manfaat sebagai kebijakan

1.4.1 Manfaat Teoretis

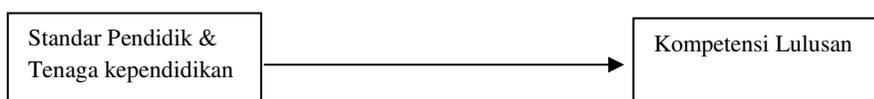
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan dan menambah kajian ilmu khususnya untuk mengetahui pengaruh Penerapan Amandemen Manila STCW 2010 Terhadap Kompetensi Lulusan Di Program Diploma Pelayaran

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan tinggi guna meningkatkan kompetensi lulusan. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk mengadakan penelitian serupa.

1.5 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Konseptual



Gambar 1

Kerangka konseptual

1.5.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir konseptual yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan hipotesis peneliti sebagai berikut :

H1 : Standar Pendidik berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan

H2 : Standar Tenaga Kependidikan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 International Maritime Organization (IMO)

Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam koperensinya pada tahun 1948 telah menyetujui membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama *Inter Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)*. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1958 organisasi tersebut telah diakui secara Internasional. Kemudian berubah nama menjadi *International Maritime Organization (IMO) sejak tanggal, 22 Mei 1982.*

Empat tahun sebelum IMO diberlakukan secara Internasional yakni pada tahun 1954 *Marine Pollution Convention* sudah mulai diberlakukan tetapi baru pada tahun 1959 secara resmi di administrasikan dan di sebar luaskan oleh IMO.

2.1.1 Tugas dan Pekerjaan IMO

Tugas Utama IMO yaitu membuat peraturan-peraturan keselamatan kerja dilaut termasuk keselamatan pelayaran dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan perairan.

SOLAS 74/78 diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980 dan MARPOL 73/78 dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 1986. Kedua Keputusan Presiden tersebut sudah tercakup dalam UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.

Konvensi-konvensi IMO paling penting yang sudah dikeluarkan adalah sebagai berikut :

- *Safety Of Life At Sea (SOLAS) Convention 1974/1978*
- *Marine Pollution Prevention (MARPOL) Convention 1973/1978*

- *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention* 1978 termasuk beberapa amandements dari setiap konvensi.

Dalam ketiga konvensi tersebut dijadikan peraturan keselamatan kerja di laut, pencegahan pencemaran perairan dan persyaratan pengetahuan dan ketrampilan minimum yang harus dipenuhi oleh awak kapal.

2.1.2 STCW 1978

Indonesia secara resmi menjadi anggota IMO sejak tanggal 18 Januari 1961, dan selama ini selalu aktif dalam mengikuti semua kegiatan IMO. Sebagai anggota IMO yang sudah lama, pengukuhan kedudukan Indonesia di IMO adalah menjadi anggota Dewan IMO (Member of IMO Council) karena dalam forum sidang Dewan inilah kepentingan nasional dapat banyak terakomodir dan turut menentukan kebijakan-kebijakan organisasi.

Indonesia pertama kali mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1973, untuk periode keanggotaan 1974 – 1975. Dua periode keanggotaan berikutnya, yaitu 1976-1977 dan 1978-1979 Indonesia masih terpilih sebagai anggota Dewan IMO. Indonesia mengalami kegagalan mencalonkan diri pada 2 periode berikutnya yaitu periode keanggotaan 1980-1981 dan 1982-1983. Pada sidang Assembly ke 13 yaitu pada tahun 1983, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan IMO, dan selalu terpilih sampai saat ini (15 periode berturut-turut).

Pada pemilihan anggota Dewan pada sidang Assembly ke 25 tahun 2007, peringkat Indonesia naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, Indonesia hanya menempati peringkat ke 8 dari 20 anggota Dewan kategori c, namun pada tahun 2007 menduduki peringkat 4 (mendapat 113 suara), dan hanya terpaut 1 suara dibanding dengan

peringkat ke 2 dan 3 (Bahama dan Cyprus memperoleh 114 suara). Pada sidang Assembly ke 26 tahun 2009 dukungan terhadap Indonesia lebih meningkat yaitu menjadi 132 dan menduduki peringkat ke 3 setelah Singapura dan Cyprus. Hal ini menunjukkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia makin meningkat. Meningkatnya jumlah negara yang mendukung Indonesia ini, maka tugas Indonesia di kancah internasional akan semakin berat karena harus menunjukkan kemampuan dan dedikasinya terhadap organisasi secara konsisten. Upaya-upaya diplomasi dan peningkatan kinerja dibidang teknis untuk ikut serta meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan laut merupakan merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan kerja-sama semua pihak yang terkait, antar kementerian, baik dalam pengaturan maupun pelaksanaan teknis.

Tidak kalah pentingnya peran dari para stake-holder seperti operator kapal, badan-badan usaha di sub-sektor transportasi laut serta masyarakat luas pengguna jasa transportasi laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang eksistensinya diakui berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), pengakuan eksistensi sebagai negara maritim terbesar dalam berbagai forum internasional masih tetap diperlukan, termasuk dalam forum Sidang Council dan Sidang Assembly di IMO.

Adanya perubahan terhadap peraturan-peraturan internasional melalui seperangkat instrumen IMO tentu saja akan menimbulkan dampak dan konsekuensi bagi setiap negara yang meratifikasi, sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan tersebut, agar dapat melaksanakan setiap konvensi yang telah diratifikasi secara penuh dan bertanggung jawab.

Sebelum pemberlakuan STCW, rambu-rambu internasional kompetensi bagi pelaut setingkat perwira/ officer, dituangkan ke dalam konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) pada Bab V (Safety of Navigation), dan beberapa ketentuan untuk awak kapal yang bukan setingkat perwira, diatur oleh masing-masing negara anggota IMO.

Mengingat makin kompleksnya permasalahan yang timbul terhadap faktor keselamatan pelayaran yang disebabkan oleh ketidakpastian kompetensi pelaut dan tidak adanya kesamaan diantara negara anggota IMO dalam melaksanakan pendidikan kepelautan, maka negara-negara anggota IMO sepakat untuk membuat konvensi internasional, khusus untuk mengatur kompetensi bagi mereka/pelaut yang akan bekerja di kapal.

Maka dibentuklah subkomite yang membahas tentang rancangan STCW tersebut. Dinamakan subkomite STCW (*Standards of Training and Watchkeeping*). Setelah melalui dari beberapa sidang subkomite STCW, setelah mendapat pengesahan pada sidang MSC (Maritime Safety Committee) dan pengukuhan pada sidang Council, maka pada tanggal 7 Juli 1978 rancangan STCW dapat diterima oleh semua anggota IMO melalui sebuah *Diplomatic Conference*, dan pada tanggal 28 April 1984, STCW 1978 diberlakukan secara penuh. Indonesia meratifikasi STCW 1978 melalui Keputusan Presiden 60 tahun 1986.

STCW mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan yang terbesar terjadi pada tahun 1995, dengan diadopsinya konvensi yang di dalamnya terdapat *Seafarer's Training, Certification and Watchkeeping* (STCW 1995), yang tidak terpisahkan dengan konvensi STCW 1978.

Dengan diberlakukannya STCW 1995, diharapkan akan terdapat keseragaman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan secara internasional, karena STCW 1995 tidak hanya mengatur secara umum ketentuan batas kompetensi pelaut, namun juga berisi tentang

kurikulum dan syllabus yang bersifat wajib (mandatory) serta yang disarankan (recommended) dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautan, yang meliputi: *competence, understanding, subject area, dan profeciency*. Termasuk metode bagaimana mengukur kompetensi yang diharapkan.

Dengan adanya keseragaman pelaksanaan diklat kepelautan tentunya diharapkan kompetensi pelaut secara internasional dapat setara, paling tidak pada tingkat batas minimal untuk menjamin keselamatan pengoperasian dikapal dapat terukur secara lebih baik.

Selanjutnya sidang-sidang STCW tetap berlangsung tiap tahun untuk mengakomodir adanya kesulitan yang mungkin timbul dalam melaksanakan STCW. Maka pada sidang STW ke 38 tahun 2007 muncullah agenda sidang dengan tema “*Comprehensive review to the STCW*” yang merupakan agenda sidang untuk merevisi STCW secara menyeluruh, mengingat terlalu banyaknya kerancuan yang terdapat pada STCW yang ada pada saat itu. Puncak dari revisi menyeluruh tersebut adalah pada sidang STCW 41 tahun 2010 dengan diterimanya rancangan perubahan STCW dan disetujui untuk dibawa ke sidang *Diplomatic Conference* di Manila pada bulan Juni 2010.

2.1.3 Amandemen STCW 2010

Telah diketahui bahwa IMO mengadakan Konferensi Diplomatik di Manila, Filipina, pertengahan tahun 2010 untuk membahas tentang amandemen STCW. Banyak orang/ masyarakat yang tidak mengetahui pada tingkat apa revisinya dan realitas implementasinya di balik hal tersebut

Amandemen STCW Manila. Pada 25 Juni 2010, Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta stakeholder utama lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi meratifikasi yang disebut

sebagai "Amandemen Manila" terhadap Konvensi Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (STCW) dan Aturan terkait. Amandemen tersebut bertujuan membuat STCW yang selalu mengikuti perkembangan jaman sejak pembuatan dan penerapan awalnya pada tahun 1978, dan amandemen selanjutnya pada tahun 1995.

2.2 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga Pendidik yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga Diklat Diploma – III Pelayaran (D – III) bidang keahlian Nautika harus menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan persyaratan sebagai berikut :

A. Persyaratan Pendidik

1. Pendidik sebagai pengampu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) pada program Diploma – III bidang keahlian nautika harus mempunyai kualifikasi minimal Strata 1 /S-1 yang keahliannya berkaitan dengan bidang studi yang diajarkan dan memiliki :
 - a. sertifikat peningkatan keterampilan dasar dan instruksional (Pekerti);
 - b. sertifikat *Applied approach* (AA);
 - c. pengalaman mengajar minimal 1 (satu) tahun;
2. Pendidik pada program Diploma – III bidang keahlian nautika yang mengampu kelompok mata kuliah peningkatan keahlian dan keterampilan (MKK), mata kuliah pengembangan keahlian berkarya (MKB), mata kuliah pengembangan perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah keahlian

berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang harus memiliki kualifikasi dan persyaratan sebagai berikut :

a. sertifikat ahli nautika tingkat – II (ANT - II) dengan pengalaman berlayar minimal 2 (dua) tahun sebagai Nakhoda (*master*) pada kapal niaga dengan ukuran 3,000 GT pada daerah pelayaran semua lautan setelah sertifikat yang dimiliki tersebut

b. sertifikat ahli teknika tingkat – II (ATT - II) dengan pengalaman berlayar minimal 2 (dua) tahun sebagai Kepala Kamar Mesin (*chief engineer*) di kapal niaga yang digerakkan dengan mesin pendorong utama 3,000 kW pada daerah pelayaran semua lautan setelah sertifikat yang dimiliki tersebut

c. sertifikat peningkatan keterampilan dasar dan instruksional (Pekerti);

d. sertifikat Akta – V atau sertifikat *Applied Approach* (AA)

e. sertifikat *training for instructor* (IMO model course 6.09)

f. sertifikat *training for examiner and assessor* (IMO model course 3.12);

g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada program diploma– II bidang keahlian nautika;

3. instruktur praktikum selain harus memiliki kualifikasi dan persyaratan tersebut butir 2 (dua) wajib memiliki sertifikat pengoperasian simulator atau laboratorium atau peralatan praktek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan praktek demonstrasi kompetensi kepelautan sesuai ketentuan *STCW 1978 Amendemen 2010 Regulation II/1, STCW Code section A-II/1* dan tabel A-II/1;

4. calon pendidik akan mengampu mata kuliah program diploma – III bidang keahlian nautika wajib menjadi asisten pendidik minimal selama 6 (enam) bulan dibawah bimbingan (tutorial) pendidik yang telah memenuhi syarat kualifikasi dan berpengalaman yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga diklat

kepelautan dan akan dilakukan evaluasi setelah waktu asistensi terpenuhi untuk dipertimbangkan sebagai pengampu mata kuliah secara penuh;

5. Secara periodik melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman sesuai perkembangan, kebutuhan dan tuntutan industri pelayaran dengan kegiatan praktek di lapangan, seminar nasional dan internasional, dan penelitian di kapal atau industri maritim secara berkala.

B. Persyaratan Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program diploma – III bidang keahlian nautika terdiri dari :

1. Ketua / Direktur / Kepala / Wakil Ketua / Wakil Direktur / Wakil Kepala Lembaga Diklat Kepelautan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah minimal S-2 atau sederajat
- b. sertifikat peningkatan keterampilan dasar dan instruksional (Pekerti);
- c. sertifikat *Applied Approach* (AA)
- d. sertifikat *training for instructor (IMO model course 6.09)*
- e. sertifikat *training for examiner and assessor (IMO model course 3.12)*
- f. salah satu pimpinan / wakil pimpinan lembaga diklat memiliki sertifikat kompetensi kepelautan minimal ahli nautika tingkat – II (ANT – II) atau ahli teknika tingkat – I (ATT – II)
- g. memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat *advanced*
- h. memiliki sertifikat pelatihan manajemen diklat kepelautan
- i. memiliki pengalaman yang terdiri dari pendidik, pengelola administrasi pendidikan, pengelola peserta diklat, pengelola sarana

prasarana diklat, pengelola standar mutu kepelautan Indonesia dan sistem penjaminan mutu pendidikan minimal 7 (tujuh) tahun

2. Tenaga administrasi.

Tenaga administrasi yang perlu tersedia untuk menjamin pelaksanaan kegiatan program diploma– III bidang keahlian nautika sekurang- kurangnya :

a. tenaga administrasi akademik

tenaga administrasi akademik yang meliputi petugas kegiatan pendaftaran, seleksi, penyusun kalender dan jadwal diklat, penyiapan bahan dan pelaksana ujian-ujian, dan penghimpun nilai-nilai ujian serta penerbitan sertifikat;

b. tenaga administrasi sarana dan prasarana diklat

tenaga administrasi sarana dan prasarana diklat meliputi petugas kegiatan penyediaan keperluan rumah tangga, pencatatan daftar inventaris dan aset, penyediaan alat tulis kantor;

c. tenaga administrasi pengelolaan peserta diklat dan pengajar

tenaga administrasi pengelolaan peserta diklat dan pengajar meliputi petugas absen, penyusun laporan dan penyiapan pelatihan serta rapat – rapat;

d. tenaga administrasi kesehatan peserta diklat

tenaga administrasi kesehatan peserta diklat meliputi petugas kegiatan pencatat dan monitoring kesehatan peserta diklat serta pendukung administrasi kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);

e. tenaga administrasi keuangan

tenaga administrasi keuangan meliputi petugas kegiatan penerimaan pembayaran biaya diklat, monitoring, akuntansi dan pelaporan;

f. tenaga administrasi perpustakaan

tenaga administrasi perpustakaan meliputi petugas registrasi, petugas pengelola buku perpustakaan, petugas perawatan buku perpustakaan dan petugas pendistribusian buku perpustakaan;

g. tenaga administrasi penjaminan mutu

tenaga administrasi penjaminan mutu meliputi petugas kegiatan penyimpanan dokumen mutu, penyiapan administrasi audit mutu internal dan eksternal, pencatatan mutu, dan administrasi pelaporan penerapan system standar mutu kepelautan.

Jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi untuk memenuhi tenaga kependidikan yang dapat menjamin terpenuhinya system standar mutu kepelautan Indonesia ditentukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan bobot pekerjaan dan jumlah peserta diklat.

3. Tenaga kepastakaan

a. berijazah minimal diploma – III (D – III) kepastakaan

b. memiliki sertifikat pelatihan manajemen diklat kompetensi kepelautan

c. berpengalaman minimal 1 (satu) tahun

d. jumlah tenaga kepastakaan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan program diklat dan peserta didik

4. Tenaga laboratorium, simulator, dan teknik informatika serta peralatan praktek lainnya

a. Tenaga teknisi laboratorium

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas;

3) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas;

4) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan laboratorium.

b. Tenaga teknisi simulator

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas;

3) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas.

4) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan simulator.

c. Tenaga teknisi peralatan praktek lainnya

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas

3) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas

4) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peralatan praktek lainnya.

d. Tenaga teknisi teknik informatika

1) berijazah minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) sesuai bidang tugas;

2) memiliki sertifikat pelatihan sesuai substansi kegiatan tugas

3) jumlah tenaga teknisi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peralatan praktek lainnya.

5. Tenaga psikologi

a. berijazah minimal S1 psikologi

b. pengalaman minimal 1 (satu) tahun dibidang pengembangan sumber daya manusia

6. Tenaga kesehatan

a. dokter

1) berijazah minimal S1 kedokteran

2) memiliki sertifikat dokter

3) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun

b. paramedis

1) berijazah minimal D - III keperawatan

2) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun

7. Tenaga kebersihan

a. petugas sampah

- 1) berijazah minimal SMP atau sederajat
 - 2) memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan sampah
 - 3) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
- b. petugas kebersihan
- 1) berijazah minimal SMP atau sederajat
 - 2) memiliki sertifikat pelatihan petugas kebersihan
 - 3) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
8. Tenaga keamanan
- a. berijazah minimal SMA atau sederajat
 - b. memiliki sertifikat satuan pengamanan dari pihak berwenang
 - c. berpengalaman minimal 1 (satu) tahun

2.3 Kualitas Pendidikan

Peraturan akademik dan manajemen mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang harus ditaati dengan disiplin dan dedikasi semua pihak. Dengan adanya sistem seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa kapal akan menuju kearah yang sudah ditentukan walaupun nakhodanya berganti ditengah perjalanan. Prasarana dan sarana akademik harus diciptakan sebagai landasan berpijak, disamping landasan mutu perguruan tinggi ini terutama sangat ditentukan oleh peran tenaga pengajar (dosen) yang berkualitas dan berbobot.

Mengenai mutu pendidikan ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003; menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana (terdapat pada Pasal 35 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Untuk mencapai mutu yang standar dari pendidikan itu bukan hanya unsur tenaga kependidikan dan tenaga pendidik tetapi bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan; yang dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan (Pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).

Badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan inilah harus disiapkan oleh pemerintah, sehingga mutu pendidikan itu memiliki kriteria minimal yang senantiasa harus dipenuhi oleh pengelola pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Strategi ini lazimnya dikaitkan dengan perubahan, sehingga menjadi strategi perubahan. Mengenai strategi mutu pendidikan berarti bagaimana mutu pendidikan harus dirubah dengan strategi yang tepat. Mengenai startegi perubahan itu ditujukan agar organisasi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka inilah maka diperlukan usaha untuk merubah organisasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Menurut Indrawijaya (1989 : 28) mengemukakan bahwa : “Usaha para manajer untuk memperbaiki atau merubah organisasi pada masa yang lampau lebih banyak dipusatkan pada perubahan : subsistem teknologi, subsistem manajerial, subsistem manusia”. Melakukan perubahan itu tidak mudah, oleh karena itu perlu disusun suatu perencanaan, sehingga di hasilkan rencana, program dan kebijakannya secara tepat untuk selanjutnya dilakukan penerapan secara konsisten. Unsur yang dapat dirubah tidak selalu seluruhnya dilakukan perubahan, salah satu saja yang dapat dilakukan berarti telah melakukan perubahan. Sebagaimana dijelaskan oleh *Robbins* (dalam Udaya, 1994 428) bahwa Strategi cenderung masuk salah satu kategori dari empat kategori yang ada: manusia, struktur, teknologi, dan proses organisasi. Bahwa jika ada kekuatan yang menciptakan perubahan, ada seseorang yang menerima peran sebagai agen perubahan, dan telah ditetapkan apa yang harus dibuang, maka

perlu memperhatikan bagaimana melaksanakan perubahan tersebut. Kita mulai melihat dengan langkah-langkah dalam proses perubahan tersebut. Keberhasilan perubahan membutuhkan pencairan status quo, perpindahan ke keadaan yang baru, dan pembekuan kembali perubahan tersebut agar menjadi permanen/tetap.

Proses perubahan itu membutuhkan langkah-langkah melalui : pencairan status quo, yakni dominasi kekuasaan itu harus dicairkan dengan menerapkan aturan, perpindahan ke keadaan yang baru, yakni adanya pemindahan kekuasaan sesuai yang telah direncanakan; dan pembekuan kembali perubahan tersebut agar menjadi permanen, yakni penetapan dengan keputusan.

Berkaitan dengan mutu pendidikan, tidak hanya yang mendapat perhatian itu dosen yang berkualitas dan berbobot, tetapi aspek lainnya seperti standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, perlu perlu juga dibangun sedemikian rupa mengingat ini memiliki keterkaitan dalam rangka organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

2.3.1 Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan tempat bagi tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan; dan efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi dapat lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan.

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang yang dibutuhkan pembangunan tersebut, pendidikan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan

misi, visi dan fungsinya. Upaya untuk menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengenai penyerapan lulusan perguruan tinggi masih menjadi perdebatan yang belum selesai, yang dikarenakan adanya perbedaan di dalam melakukan pendekatan. Sedikitnya itu ada dua pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan kalangan perguruan tinggi. Pendekatan pertama, menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak mempunyai kemampuan bekerja sebagaimana yang diinginkan dunia kerja, yakni keahlian yang dimiliki masih jauh dari yang diharapkan. Pendekatan pertama ini menginginkan, lulusan perguruan tinggi harus memiliki keterampilan kerja (*skill*) yang memadai dan siap untuk bekerja. Kalangan perguruan tinggi sebenarnya tanggap dan merespon, sehingga disiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti komputerisasi, laboratorium, bengkel kerja dan pusat data, dll. Namun pada kenyataannya dalam membentuk keahlian itu tidak memadai dan tidak menyebar secara merata di setiap perguruan tinggi. Pendekatan ke dua, dari kalangan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Kecakapan dan keterampilan kerja (*skill*) tidak identik, keterampilan merupakan bagian dari kecakapan.

Pada pendekatan ke dua ini memang, tujuan pendidikan itu tidak disiapkan hanya untuk siap kerja, tetapi jauh lebih luas, yaitu menyangkut pembentukan peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan keterampilan

merupakan hal penting yang dapat dimiliki oleh seseorang. Namun demikian, perbedaan dua pendekatan yang berbeda ini harus dikembangkan adanya pemahaman yang mendalam sehingga tidak saling mengklaim benarnya sendiri, minimal dapat ditarik pokok permasalahannya. Pendidikan sebagai suatu proses, pertama mengenal adanya *raw-input* dan *instrumental input*. *Raw input* merupakan peserta didik sedangkan *instrumental input* terdiri dari gedung, perpustakaan, pedoman akademik, laboratorium, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain. Kedua *raw input* dan *instrumental input* masuk dalam proses. Ketiga, *output* (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk kedalam kompetisi sumber daya manusia. Dosen merupakan salah satu instrument yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosen perpindahan ilmu dilakukan kepada peserta didik.

Perguruan tinggi yang memiliki tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu program untuk meningkatkan kualitas para dosen adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat lagi pada saat ini dan dimasa mendatang. Perguruan tinggi yang tidak mengikuti perkembangan perubahan sekarang dan dimasa yang akan datang.

2.4 Kompetensi Lulusan

Menurut Kepmendiknas RI No 045/U/2002 Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Menurut Kepmendiknas RI No 045/U/2002

- Pasal 1 Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas di bidang pekerjaan tertentu.

- Pasal 2 (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

2.4.1 Pengertian Standar Kompetensi

Standar diartikan adalah sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang telah ditetapkan.

Dengan demikian disepakati bahwa standar kompetensi adalah kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" di bidangnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Walaupun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- a) Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- b) Memberikan pengarahannya yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- c) Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang akan diharapkan.

d) Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang akan berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan yaitu hubungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2002;11) penelitian eksplanasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan penelitian eksplanasi yaitu untuk menjelaskan hubungan antar dua variabel.

Sedangkan data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana penulis untuk mendapatkan data yang obyektif valid dan *reliable* menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasional yaitu penjabaran secara khusus dan terinci tentang variabel yang dianalisis, sehingga variabel dapat diukur. Adapun definisi operasionalnya yaitu:

1) Variabel bebas (X)

Variabel bebas diukur melalui tenaga pendidik , yang meliputi: dosen yang mempunyai kualifikasi pelayaran. Variabel dijelaskan sebagai berikut:

X1 = Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelayaran dunia maritim.

Tenaga Pendidik diukur melalui pengukuran dua indikator yaitu:

1. Pendidik sebagai pengampuh mata Kuliah MPK
2. Kualifikasi Pendidik Minimal ANT II/ATT II

X2 = Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga Kependidikan diukur melalui pengukuran dua indikator yaitu :

1. Pejabat Struktural
2. Tenaga Administrasi

2) Variabel Terikat Kompetensi Lulusan (Y)

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Adapun indikator variabel kompetensi :

1. landasan kepribadian;
2. penguasaan ilmu dan keterampilan;
3. kemampuan berkarya;
4. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
5. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pengukuran Variabel X dan Y ini adalah menggunakan skala Likert, cara pengisian kuisioner yaitu dengan cara memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang disediakan dengan ketentuan skor yang ditetapkan sebagai berikut:

Jawaban (A) dengan skor 5 = sangat setuju

Jawaban (B) dengan skor 4 = setuju

Jawaban (C) dengan skor 3 = ragu-ragu

Jawaban (D) dengan skor 2 = tidak setuju

Jawaban (E) dengan skor 1 = sangat tidak setuju

3.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini untuk memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti melakukan penelitian pada Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya.

3.4 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (1999 : 72) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini sebesar 32 responden.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan angket atau daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut adalah berupa jawaban dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari luar data primer dan bermanfaat atau dapat mendukung pada penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur atau sumber lain yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah penelitian. Peneliti juga mengumpulkan data – data pendukung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan tertulis, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat tertutup atau terbuka.

b. Studi pustaka

Peneliti membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan amandemen manila 2010, terutama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan penelitian baik data yang diperoleh dari perhubungan laut maupun keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis statistik induktif (*inferensial*), yaitu model analisis yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari keseluruhan anggota populasi atau menguraikan populasi yang dipelajari, yang didasarkan dari hasil penyidikan sebagai populasi atau sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah :

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Kuesioner sebagai alat pengumpul data harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya pada beberapa orang (32 orang) responden, sebagai uji pendahuluan (*pretest*) untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan *valid dan reliable* (Singarimbun) dan Effendi, 2005:137-140). Uji *validitas dan reliabilitas* pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji *Validitas* Alat Ukur (Kuesioner)

Uji *validitas* menurut Azwar (2000:5) didefinisikan sebagai “ukuran seberapa tepat dan cermat suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya”. Tujuan dari pengujian *validitas* pada data-data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah untuk mengecek apakah isi kuesioner tersebut telah cukup dipahami untuk semua responden, yang diindikasikan oleh kecilnya presentase jawaban dari responden yang telah menyimpang dari rata-rata jawaban responden lain. Pengukuran validitas pada penelitian ini memakai “koefisien korelasi *Pearson Product-Moment* (r)” untuk menunjukkan kuat dan arah saling berhubungan antar variasi-variasi distribusi skor. Rumus teknik korelasi *Pearson Product Moment* adalah :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

X = skor pernyataan nomor

Y = skor total

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer dengan *SPPSS for windows version 17.0.* untuk menentukan kesahihan secara statistik, angka korelasi yang diperoleh (r hitung) pada taraf 0.05 pada derajat bebas n-2. Bila angka korelasi yang diperoleh berada diatas angka kritis (r hitung > r tabel) berarti item tersebut telah *valid*. Sedangkan bila

angka koelasi yang diperoleh berada dibawah angka kritis (r hitung $<$ r tabel) berarti item tersebut tidak sah. Jika hasil yang didapatkan tidak valid, maka harus dilakukan koreksi terhadap indikator yang menyebabkan tidak *valid*, sehingga indikator/item yang tidak valid harus dibuang. Tetapi hasil yang didapatkan *valid*, maka pengujian dilanjutkan ke uji *reliabilitas*.

b. Uji *Realibilitas*

Uji *realibilitas* menurut Azwar (2000:4) adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam berapa kalipun pertanyaan atau variable ditanyakan pada responden jawabannya akan relatif sama, selama aspek yang diukur dalam subyek memang belum berubah. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien alpha dengan menggunakan metode *alpha cronbach's*. Pengujian *reliabilitas* dilakukan dengan menghitung nilai r alpha (koefisien) dengan rumus :

$$R = \frac{2rb}{1 + rb} \quad (\text{Sugiyono, 2005:122})$$

$$1 + rb$$

Dimana :

r = reliabilitas instrument (r alpha)

rb = koefisien korelasi validitas instrument

Bila r alpha $>$ dari r table, maka instrument tersebut dikatakan reliable. Sebaliknya, jika r alpha $<$ table, maka instrument tersebut dikatakan tidak reliable. Nilai r table ditentukan dengan melihat nilai r *product moment (table statistic)* dengan $df = \text{jumlah kasus} - 2$ dan tingkat signifikansi 5%.

3.7.2 Analisis Regresi

Analisa yang digunakan adalah model Regresi Linier Berganda karena terdapat variable independent dengan satu variable dependen yang dalam hal ini adalah untuk mengukur besarnya hubungan atau pengaruh penerapan amandemen manila 2010 bagi tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kompetensi lulusan di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya. Adapun persamaanya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Dimana :

Y = kompetensi lulusan

a = Koefisien intercept (titip potong kurva terhadap sumbu Y)

b = Koefisien variable dependen X1-X2

X1 = Dimensi Tenaga Pendidik

X2 = Dimensi Tenaga Kependidikan

e = Variabel error

3.8 Analisis Korelasi Berganda

Analisis Korelasi Berganda merupakan ukuran yang kedua yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara dua variable atau lebih yang diteliti secara bersama-sama.

Mengukur korelasi Menurut Sugiyono (2004 : 182) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

r_{xy} = koefisien korelasi

X = item dari variabel yang di uji

N = banyaknya sampel

Y = jumlah skor variabel di uji

3.9 Uji hipotesis

a. Uji t (uji parsial)

untuk mengetahui pengaruh penerapan amandemen manila 2010 terhadap kompetensi lulusan secara parsial menurut J.Suprpto (1990:198) rumus yang digunakan :

$$t \text{ hitung} = \frac{\sqrt{(r^2)(n-2)}}{1-r}$$

Keterangan :

1 = korelasi parsial yang ditemukan

n = jumlah sampel

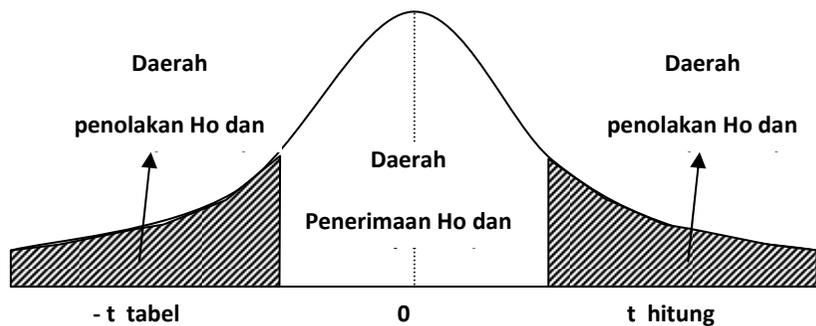
t = t hitung yang selalu dibandingkan dengan t tabel.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan kepercayaan 95 % atau $\alpha = 0,05$ dengan kriterianya adalah :

1. H_0 diterima jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$, berarti regresi parsial tidak signifikan.
 2. H_0 diterima jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$, berarti secara parsial signifikan.
- Daerah kritis H_0 melalui kurva distribusi t dua sisi.

Gambar 2

Daerah Penolakan H_0 dan Penerimaan H_1



b. Uji F (Uji Serempak)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya signifikansi hubungan antara penerapan amandemen manila 2010 terhadap kompetensi lulusan secara simultan.

Rumus yang digunakan :

$$F = \frac{R^2 (N - M - 1)}{M (1 - R^2)}$$

$$M (1 - R^2)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien daterminasi

N = Banyaknya sampel

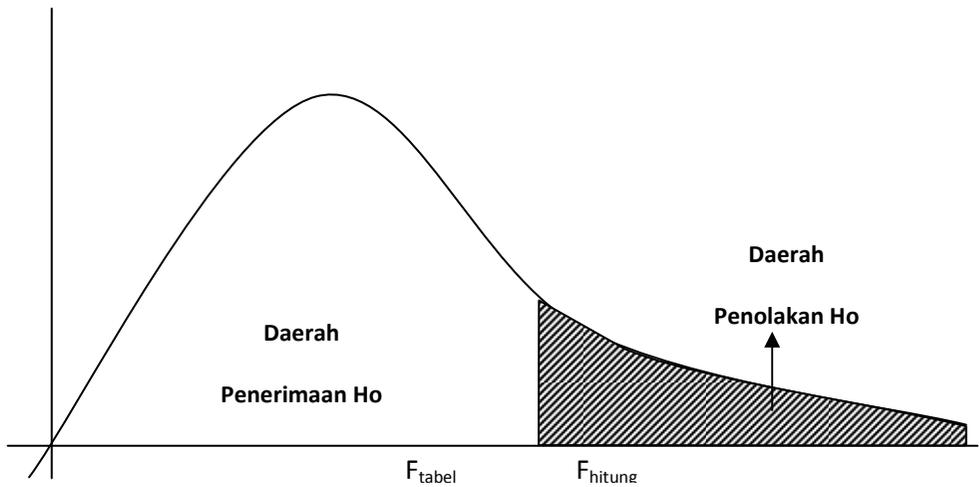
M = Banyaknya variabel bebas

Pengujian intergritas dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95 % atau $\alpha = 0,05$ dengan kriterianya adalah :

- H_0 diterima jika F hitung $<$ F tabel, berarti korelasi ganda secara simultan.
- H_0 diterima jika F hitung $<$ F tabel, berarti korelasi ganda secara simultan signifikasi.
- Jika F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikasinya lebih besar alpha, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Gambar 3

Kurva distribusi F



BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Data Penelitian

Tabel 1

Tabulasi data

No	Tenaga Pendidik					Tenaga Kependidikan					Kompetensi Lulusan					
	1	2	3	4	TX 1	1	2	3	4	TX2	1	2	3	4	5	TY
1	4	5	5	5	19	5	5	4	5	19	5	5	5	5	4	20
2	4	4	3	4	15	3	3	4	4	14	4	4	3	4	4	15
3	5	4	5	4	17	4	5	4	5	18	5	5	5	4	5	18
4	5	4	5	4	18	4	4	5	4	17	4	4	5	5	5	17
5	4	4	4	4	16	4	5	4	4	15	4	5	5	4	4	17
6	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	16
7	3	4	4	4	15	3	4	3	4	14	3	3	4	4	4	14
8	5	4	5	5	19	5	5	4	4	18	5	4	5	5	5	18
9	4	5	5	4	18	4	4	5	5	18	5	5	5	4	5	19
10	4	3	4	4	15	3	4	4	3	14	4	4	4	3	4	15
11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	14	4	4	4	4	4	16
12	4	4	5	5	16	4	5	5	4	17	4	4	4	5	5	17
13	4	5	5	4	18	4	5	5	5	19	5	4	5	5	5	19
14	4	4	3	4	15	4	3	4	3	14	4	4	4	4	4	16
15	4	5	4	4	17	4	4	5	5	17	5	5	4	4	5	16
16	4	4	4	4	16	4	5	4	5	16	4	4	5	4	5	17

17	4	3	4	4	15	4	4	4	4	17	4	4	4	3	4	15
18	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	4	4	3	4	4	15
19	4	4	3	3	14	3	4	3	4	14	4	4	4	4	4	16
20	5	5	4	5	17	4	5	5	5	19	5	5	4	4	5	18
21	4	4	4	3	15	4	4	3	4	15	4	3	4	3	4	16
22	5	5	5	4	17	4	5	4	4	15	4	5	4	4	5	17
23	5	5	4	4	18	5	5	4	5	17	4	4	5	5	5	18
24	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	16
25	5	5	5	4	17	4	4	5	4	17	4	4	5	5	5	18
26	4	4	4	4	16	4	4	4	3	16	4	4	4	3	4	15
27	5	5	5	4	18	4	5	5	5	19	4	4	5	5	5	18
28	5	5	4	5	18	5	4	5	5	17	4	5	4	4	5	17
29	4	4	5	5	18	4	5	5	4	16	4	5	4	4	5	17
30	4	5	4	4	17	5	5	5	4	16	4	5	4	4	5	17
31	5	5	4	4	18	5	4	5	5	16	4	5	4	5	4	17
32	5	5	5	4	19	5	4	5	5	17	4	5	4	5	5	18

4.2 Deskripsi Responden, Deskripsi Variabel Penelitian

A. Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada responden maka pada bagian ini menjelaskan tentang profil responden dan profil variabel penelitian yang sangat berguna dalam mendukung analisis. Deskripsi responden ini memuat tentang jenis kelamin, usia responden, tingkat pendidikan.

Tabel 2
Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	25	78%
Perempuan	7	22%
Total	32	100%

Sumber Data Primer

Berdasarkan tabel 4.1. komposisi responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang atau 78% sedangkan 7 orang atau 22% adalah perempuan.

Tabel 3
Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
SMU	6	19%
D3	2	6%
S1	4	13%
S2	19	59%
S3	1	3%
Total	32	100%

Sumber Data Primer

Berdasarkan Tabel 4.2. komposisi tingkat pendidikan karyawan yang dijadikan responden yaitu tingkat SMU berjumlah 6 atau 19% responden, D3 sebanyak 2 responden atau 6%, S1 sebanyak 4 responden atau 13% dan S2 sebanyak 19 responden atau 59% SERTA S3 sebanyak 1 responden atau 3%.

B. Dekripsi Variabel Penelitian

Tabel 4

Tanggapan Responden terhadap indikator X1.1

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	11 Orang	34.4 %
Setuju	20 Orang	62.5 %
Ragu-Ragu	1 Orang	3.1 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 11 orang atau (34.4 %) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 20 orang atau (62.5 %) responden menjawab Setuju, sejumlah 1 orang atau (3.1 %) menjawab Ragu-Ragu,sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 5

Tanggapan Responden terhadap indikator X1.2

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	13 Orang	40.6 %
Setuju	17 Orang	53.1 %
Ragu-Ragu	2 Orang	6.3 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 13 orang atau (40.6%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 17 orang atau (53.1%) responden menjawab Setuju, sejumlah 2 orang atau (6.3%) menjawab Ragu-Ragu,sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 6

Tanggapan Responden terhadap indikator X1.3

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	12 Orang	37.5 %
Setuju	17 Orang	53.1 %
Ragu-Ragu	3 Orang	9.4 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 12 orang atau (37.5%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 17 orang atau (53.1%) responden menjawab Setuju, sejumlah 3 orang atau (9.4 %) menjawab Ragu-Ragu,sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 7

Tanggapan Responden terhadap indikator X1.4

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	6 Orang	18.8 %

Setuju	24 Orang	75.0 %
Ragu-Ragu	2 Orang	6.3 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 5 orang atau (18.8%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 24 orang atau (75.0%) responden menjawab Setuju, sejumlah 2 orang atau (6.3%) menjawab Ragu-Ragu,sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 8

Tanggapan Responden terhadap indikator X2.1

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	7 Orang	21.9 %
Setuju	21 Orang	65.6 %
Ragu-Ragu	4 Orang	12.5 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %

Jumlah	32 Orang	100 %
---------------	-----------------	--------------

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa 7 orang atau (21.9%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 21 orang atau (65.6%) responden menjawab Setuju, sejumlah 4 orang atau (12.5%) menjawab Ragu-Ragu,sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 9

Tanggapan Responden terhadap indikator X2.2

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	13 Orang	40.6 %
Setuju	15 Orang	46.9 %
Ragu-Ragu	4 Orang	12.5 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa 13 orang atau (40.6%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 15 orang atau (46.9%) responden menjawab Setuju, sejumlah 4 orang atau (12.5%) menjawab Ragu-

Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 10

Tanggapan Responden terhadap indikator X2.3

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	13 Orang	40.6 %
Setuju	14 Orang	43.8 %
Ragu-Ragu	5 Orang	15.6 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa 13 orang atau (40.6%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 14 orang atau (43.8%) responden menjawab Setuju, sejumlah 5 orang atau (15.6%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 11

Tanggapan Responden terhadap indikator X.2.4

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	12 Orang	37.5 %
Setuju	17 Orang	53.1 %
Ragu-Ragu	3 Orang	9.4 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa 12 orang atau (37.5%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 17 orang atau (53.1%) responden menjawab Setuju, sejumlah 3 orang atau (9.4%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 12

Tanggapan Responden terhadap indikator Y1.1

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	7 Orang	21.9 %

Setuju	24 Orang	75.0 %
Ragu-Ragu	1 Orang	3.1 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	52 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 7 orang atau (21.9%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 24 orang atau (75.0%) responden menjawab Setuju, sejumlah 1 orang atau (3.1%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab sangat Tidak Setuju.

Tabel 13

Tanggapan Responden terhadap indikator Y1.2

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	12 Orang	37.5 %
Setuju	18 Orang	56.3 %
Ragu-Ragu	2 Orang	6.3 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %

Jumlah	32 Orang	100 %
---------------	-----------------	--------------

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa 12 orang atau (37.5%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 18 orang atau (56.3%) responden menjawab Setuju, sejumlah 2 orang atau (6.3%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Sangat Tidak Setuju.

Tabel 14

Tanggapan Responden terhadap indikator Y1.3

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	11 Orang	34.4 %
Setuju	19 Orang	59.4 %
Ragu-Ragu	2 Orang	6.3 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	52 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa 11 orang atau (34.4%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 19 orang atau (59.4%) responden

menjawab Setuju, sejumlah 2 orang atau (6.3%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Sangat Tidak Setuju

Tabel 15

Tanggapan Responden terhadap indikator Y1.4

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	10 Orang	31.3 %
Setuju	18 Orang	56.3 %
Ragu-Ragu	4 Orang	12.5 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa 10 orang atau (31.3%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 18 orang atau (56.3%) responden menjawab Setuju, sejumlah 4 responden atau (12.5%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Sangat Tidak Setuju

Tabel 16

Tanggapan Responden terhadap indikator Y1.5

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Setuju	17 Orang	53.1 %
Setuju	15 Orang	46.9 %
Ragu-Ragu	0 Orang	0 %
Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Sangat Tidak Setuju	0 Orang	0 %
Jumlah	32 Orang	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa 17 orang atau (53.1%) responden menjawab Sangat Setuju, sejumlah 15 orang atau (46.9%) responden menjawab Setuju, sejumlah 0 responden atau (0%) menjawab Ragu-Ragu, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Tidak Setuju, sejumlah 0 orang atau (0%) responden menjawab Sangat Tidak Setuju

4.3. Analisis Data dan Interpretasi

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil perhitungan dan pengolahan data diperoleh dari bantuan hasil perhitungan dan pengolahan program komputer SPSS (*Statistic Program for Social Solution*) versi 17. Adapun hal yang menjadi bahan pertimbangan dari penggunaan program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Program SPSS merupakan program komputer, sehingga dalam perhitungan dan pengolahan, hasilnya dapat lebih dipertanggung jawabkan dan lebih akurat.
- b. Proses perhitungan dan pengolahan datanya lebih dari cepat daripada perhitungan manual, sehingga dapat mempersingkat waktu pengolahan dan perhitungan.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner/ alat ukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total seluruh butir pertanyaan dalam suatu variable. Perhitungan korelasi yang digunakan adalah korelasi *product moment* dari *person* (Imam Gozali, 2001:136-137), kriterianya adalah sebagai berikut :

- a. Suatu butir adalah valid jika terdapat korelasi yang signifikan akan ditunjukkan $\alpha = 0,05$ antara butir pertanyaan yang diukur validitasnya dengan skor total butir pertanyaan.
- b. Suatu butir pertanyaan adalah tidak valid jika nilai signifikansinya melebihi $\alpha = 0,05$ atau tidak terdapat korelasi yang signifikan antara butir pertanyaan tersebut dengan skor total seluruh butir pertanyaan.

Hasil uji validitas disajikan pada tabel dibawah ini, sedangkan hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran penelitian ini :

Tabel 17

Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai Korelasi	Signifikan	Keterangan
X1.1	0.557	0,001	Valid
X1.2	0.545	0,001	Valid
X1.3	0.624	0,000	Valid
X1.4	0.372	0,036	Valid
X2.1	0.369	0,038	Valid
X2.2	0.579	0,001	Valid
X2.3	0.686	0,000	Valid
X2.4	0.524	0,002	Valid
Y1.1	0.380	0,032	Valid
Y1.2	0,396	0,025	Valid
Y1.3	0,462	0,008	Valid
Y1.4	0,475	0,006	Valid
Y1.5	0.557	0,001	Valid

Berdasarkan tabel 4.40 di atas dapat diketahui bahwa seluruh butir item/bagian pertanyaan memiliki nilai signifikansi korelasi lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid sehingga dapat dilakukan uji reliabilitas.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6.

Hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran ini. Sedangkan intisarinya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 18
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai alpha	<i>Cut off</i>	Ket
All Variabel	0,907	0,6000	<i>Reliabel</i>

Berdasarkan tabel 4.41 diatas terlihat bahwa nilai alpha untuk semua variabel lebih besar daripada 0,6 sehingga variabel-variabel tersebut dinyatakan reliable.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh kesiapan sumber daya manusia sehubungan penerapan amandemen Manila STCW 2010 terhadap kompetensi lulusan, digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19

Pengujian Secara Simultan dari Hasil Olahan Data

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T hitung	Sig. T
Konstanta	3,153		
(X ₁)	0,440	3,021	0,005
(X ₂)	0,389	3,268	0,003
R ² Square	0,725		
R Berganda	0,851		
Sig. F	0,000		
F _{Hitung}	38,137		

Sumber: Lampiran

Tujuan digunakannya persamaan regresi adalah untuk melakukan pendugaan variasi nilai suatu variabel terikat yang disebabkan oleh variasi nilai suatu variabel bebas. Dengan demikian dalam penelitian ini, fungsi dari persamaan regresi linier berganda adalah untuk melakukan pendugaan nilai kompetensi lulusan, apabila terjadi perubahan pada kesiapan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan). Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS (Tabel 5.17), persamaan regresi dalam penelitian ini diperoleh:

$$Y = 3,153 + 0,440 X_1 + 0,389 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas, dilakukan interpretasi terhadap masing-masing nilai koefisiennya sebagai berikut:

a. Konstanta (a) = 3,153

Nilai konstanta (a) = 3,153 artinya jika tidak ada variabel sumber daya manusia, maka nilai variabel kompetensi lulusan (Y) = 3,153

b. Koefisien regresi $b_1 = 0,440$

Artinya apabila nilai variabel tenaga pendidik naik satu satuan, maka nilai variabel kompetensi lulusan (Y) akan naik sebesar 0,440 dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya tidak berubah atau tetap.

c. Koefisien regresi $b_2 = 0,389$

Artinya apabila nilai variable tenaga kependidikan naik satu satuan, maka nilai variable kompetensi lulusan (Y) akan naik sebesar 0,389 dengan asumsi nilai variable bebas lainnya tidak berubah atau tetap.

Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan variabel tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan variabel terikat kompetensi lulusan (Y). Hasil pengolahan data diperoleh nilai R berganda sebesar 0,851 Koefisien korelasi berganda tersebut menunjukkan bahwa antara variable tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan, hal ini dapat dilihat pada tabel 20 tentang interpretasi koefisien korelasi.

Tabel 20

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah

0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2000:149)

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh Nilai R sebesar 0,851 berarti variable X1 & X2 mempunyai tingkat hubungan kuat terhadap variable terikat Y. & nilai R Square, yaitu sebesar 0,725, artinya sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel X1 & X2 terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 72,5%.

Pengujian Hipotesis

Agar hasil analisis regresi tersebut dapat dipakai untuk menyimpulkan tingkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka koefisien regresi tersebut perlu diuji kebenarannya, baik secara simultan (bersama-sama) dengan menggunakan uji F maupun secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t.

Pengujian Secara Simultan dengan uji F

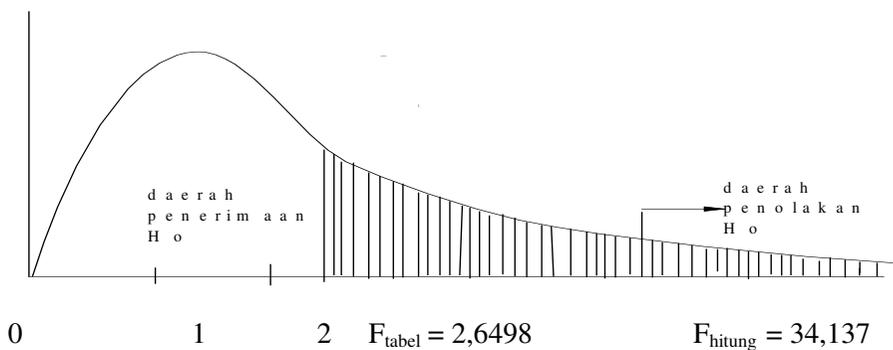
Uji F digunakan untuk menguji secara simultan (bersama-sama) apakah ada pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hipotesis statistik untuk uji F :

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, berarti kesiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kompetensi lulusan.

$H_0 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, berarti tenaga pendidik dan kependidikan secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi lulusan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, diperoleh $F_{hitung} = 38,137$. Pada tingkat signifikan 5%, nilai F_{tabel} untuk derajat bebas pembilang ($df_1 = k = 3$) dan derajat bebas pembagi ($df_2 = n-k-1 = 38,137-3-1 = 34,137$), maka $F_{tabel 0,05 (3,209)}$ sebesar 2,6498. Karena $F_{hitung} (34,137) > F_{tabel} (2,6498)$, maka H_0 ditolak, berarti kesiapan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi lulusan, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara variabel tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kompetensi lulusan terbukti.

Gambar 4

Kurva F Pengaruh X_1, X_2 , terhadap Y



Pengujian Secara Parsial dengan uji t

Untuk mengetahui pengaruh variabel tenaga pendidik secara parsial terhadap kompetensi lulusan, maka dilakukan pengujian secara parsial.

Tabel 21

Pengujian Secara Parsial Dengan Uji t

Variabel	t_{hitung}	Sig	Beta
(X1)	3.021	0.005	0.438
(X2)	3,268	0.003	0.474

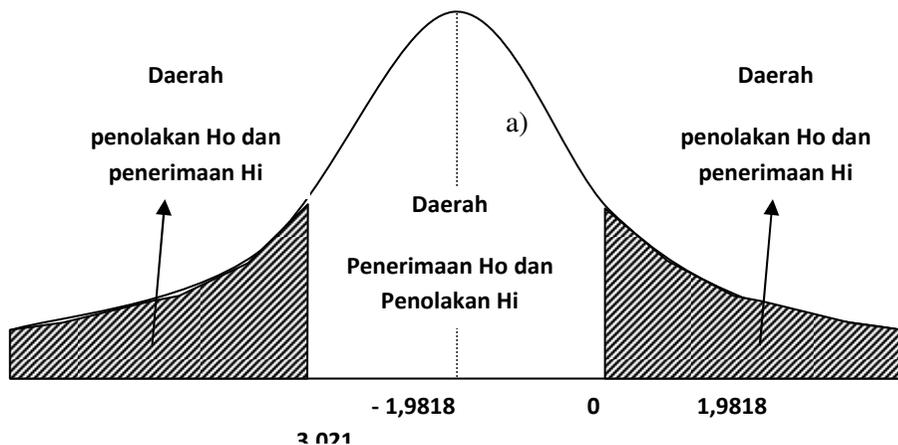
Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 21 terlihat bahwa variabel tenaga pendidik berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (H_0 ditolak), karena nilai t_{hitung} ($=3,021$) $> t_{tabel}$ ($=1,9818$). Dari pengolahan data dengan SPSS disamping diperoleh informasi t_{hitung} , juga memberikan informasi nilai (*sig*) 0,005 lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5% (0,05).

Gambar 5

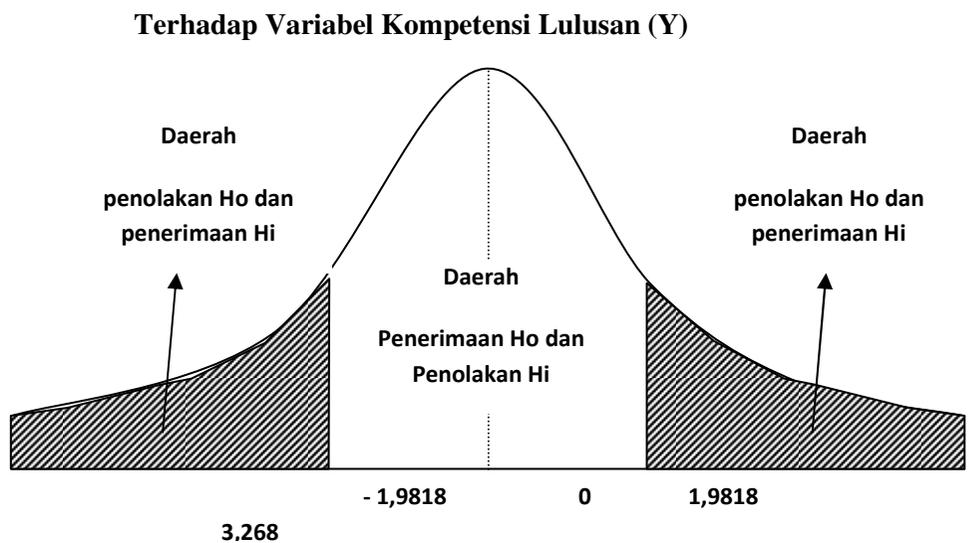
Uji Parsial Pengaruh Variabel Tenaga Pendidik (X1)

Terhadap Variabel Kompetensi Lulusan (Y)



b) Berdasarkan Tabel 21 terlihat bahwa variabel tenaga kependidikan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (H_0 ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,28) > t_{tabel} (=1,9818)$. Dari pengolahan data dengan SPSS disamping diperoleh informasi t_{hitung} , juga memberikan informasi nilai (*sig*) 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$ (0,05)).

Gambar 6
Uji Parsial Pengaruh Variabel Tenaga Kependidikan (X2)



Pembahasan

Pengaruh Standar Pendidik dan tenaga kependidikan terhadap Kompetensi Lulusan di Program Diploma Pelayaran.

Hasil pengolahan data diperoleh nilai R berganda sebesar 0,851 Koefisien korelasi berganda tersebut menunjukkan bahwa antara variable tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan, Koefisien determinasi ditunjukkan oleh Nilai R sebesar 0,851 berarti variable X1 & X2 mempunyai tingkat hubungan kuat terhadap variable terikat Y. & nilai R Square, yaitu

sebesar 0,725, artinya sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel X1 & X2 terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 72,5%.

Dari uji F kesiapan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi lulusan, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara variabel tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kompetensi lulusan. Dari uji t tenaga pendidik berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (H_0 ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,021) > t_{tabel} (=1,9818)$. tenaga kependidikan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi lulusan (H_0 ditolak), karena nilai $t_{hitung} (=3,28) > t_{tabel} (=1,9818)$.

Implikasi dari penelitian ini adalah Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di program pelayaran harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku baik peraturan dari Dikti dan Perhubungan laut, sehingga diharapkan kompetensi lulusan mempunyai potensi yang unggul dibidangnya.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana hubungan variabel standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kompetensi lulusan di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah. Pengaruh faktor-faktor ini sangat penting untuk diketahui terutama membantu instansi dalam upaya menyusun program-program untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

Hasil pengolahan data Koefisien korelasi berganda menunjukkan bahwa antara variable tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap variabel kompetensi lulusan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penelitian ini adalah Program Diploma Pelayaran hendaknya dan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan cara mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang diprogramkan oleh institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmendiknas RI No 045/U/2002, Kompetensi lulusan
- Sugiyono.2004. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Jakarta
- Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. 2010.
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEPELAUTAN SESUAI *STCW*
AMENDEMEN 2010 MANILA
- Umar, Husein, 2008. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UU RI No 20 2003, Pasal 1 ayat 17, Standar pendidikan nasional
<http://www.maritimeworld.web.id/2010/12/pengertian-international-maritime.html>
- <http://www.hangtuah.ac.id/latar> belakang program diploma pelayaran
universitas hang tuah Surabaya



Mudiyanto lahir di Surabaya 06 September 1979, Lulus S1 Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Hangtuah tahun 2010. Studi S2 Ilmu Manajemen di STIESIA Surabaya lulus tahun 2015, dan menyelesaikan ANT-II pada tahun 2012 di PIP Semarang.

Hubungan variabel standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kompetensi lulusan di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengaruh faktor-faktor ini sangat penting untuk diketahui terutama membantu instansi dalam upaya menyusun program-program untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

Buku ini adalah Monograf dari penelitian yang berisi tentang Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia Sehubungan Penerapan Amandemen Manila STCW 2010 Terhadap Kompetensi Lulusan Di Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya.

ISBN 978-602-5595-21-9



Hang Tuah University Press